

ESKALASI KETEGANGAN DI LAUT CHINA SELATAN DAN SIKAP ASEAN

Simela Victor Muhamad

Abstrak

Di tengah pandemi Covid-19, Laut China Selatan (LCS) kembali memanas ketika Amerika Serikat (AS) dan China saling mengirim armada tempurnya ke wilayah yang dipersengketakan oleh China dan sejumlah negara ASEAN itu. Hal tersebut menjadi keprihatinan ASEAN, karena telah menimbulkan ketegangan dan bisa mengancam stabilitas kawasan Asia Tenggara. Tulisan ini mengkaji secara singkat perihal ketegangan di LCS yang kerap terjadi, dan bagaimana seharusnya disikapi oleh ASEAN. Ketegangan di LCS tidak dapat dipisahkan dari adanya persetujuan antara AS dan China di kawasan Asia-Pasifik. Ketegangan di LCS tidak boleh dibiarkan oleh ASEAN. ASEAN harus mengambil sikap tegas dalam menyusun Code of Conduct (CoC) dengan China terkait LCS. CoC yang disusun dan disepakati harus ditujukan untuk mencegah terjadinya ketegangan dan konflik di LCS. ASEAN harus mengedepankan multilateralisme dan terus mempromosikan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional dalam mencari solusi damai atas isu LCS. Parlemen negara-negara ASEAN, melalui AIPA, sudah tentu juga harus mendukung sikap ASEAN.

Pendahuluan

Saat dunia disibukkan oleh persoalan pandemi Covid-19, situasi keamanan di Laut China Selatan (LCS) kembali memanas ketika Amerika Serikat (AS) dan China saling mengirim armada tempurnya ke wilayah LCS (Kompas, 17 Mei 2020). China menuding AS telah melanggar batas di Kepulauan Spratly pada 29 April dan menerbangkan

pesawat pengebom B-1B di atas perairan LCS dan Laut Taiwan pada 1 Mei. China, yang melihat aksi AS sebagai tindakan provokasi, segera menyiapkan latihan militer besar-besaran, yang disebutnya sebagai upaya untuk menghalau provokasi AS pascapandemi. Sebaliknya, AS menilai China telah memanfaatkan situasi pandemi Corona untuk memperluas



klaimnya di LCS di tengah upaya AS memerangi wabah yang menyerang kapal induknya.

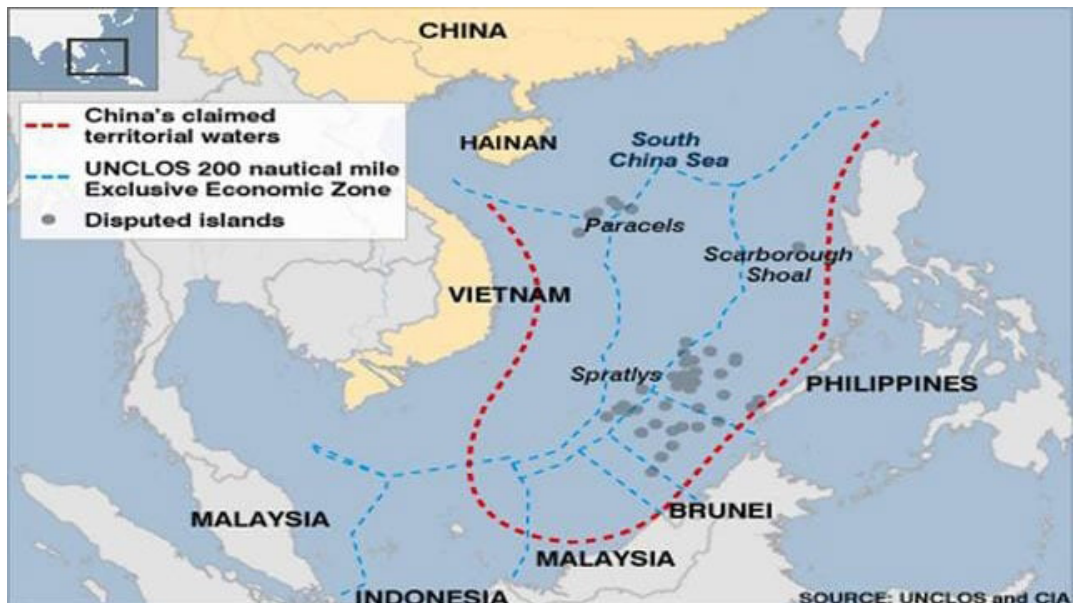
Situasi memanas yang terjadi di LCS memang sudah terlihat dalam satu bulan terakhir. Pada 16 April, kapal survei China, Haiyang Dizhi, mengusik eksplorasi migas West Capella yang dilakukan Petronas di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Malaysia di kawasan LCS, yang juga diklaim China sebagai wilayah kedaulatannya (republika.co.id., 21 April). Pada 19 April, tindakan China mengumumkan penamaan 80 pulau dan fitur geografis lainnya di LCS telah memicu kemarahan negara-negara pengklaim LCS lainnya (kompas.com., 21 April 2020). Sementara itu sejak 20 April, seteru China, AS, melalui latihan bersama dengan Australia, melakukan manuver di kawasan LCS, utamanya di lokasi-lokasi sengketa (pikiranrakyat.com., 23 April 2020).

Situasi yang terjadi di LCS tersebut telah menjadi keprihatinan ASEAN, termasuk Indonesia, sebagaimana dikemukakan Menlu Retno Marsudi dalam konferensi pers virtualnya pada 6 Mei, karena berpotensi meningkatkan ketegangan di saat upaya kolektif global dibutuhkan untuk melawan Covid-19 (thejakartapost.com., 7 Mei 2020). Menarik kemudian untuk dibahas, mengapa ketegangan di LCS kerap terjadi, dan bagaimana seharusnya disikapi oleh ASEAN.

Perseteruan AS-China

Sebagaimana diketahui, konflik LCS merupakan sengketa klaim teritorial di LCS antara China dan sejumlah negara ASEAN (Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei Darussalam) serta Taiwan (lihat Gambar-1). Hingga saat ini solusi damai atas konflik LCS belum berhasil dicapai, terutama disebabkan oleh sikap keras China yang mengklaim hampir seluruh wilayah LCS, yang tercakup dalam 9 garis putus-putus (*nine-dash line*), garis batas imajiner yang ditentukan sepihak oleh China, yang tidak diakui dalam hukum internasional. Sikap keras China dalam praktiknya kerap memicu gesekan atau konflik, seperti antara kapal China dengan kapal negara pengklaim LCS lainnya, bahkan dengan kapal asing, terutama AS, karena dianggap China telah melanggar wilayah kedaulatannya.

Hanna Beech, analis New York Times, menyebutkan bahwa kehadiran kapal perang AS di perairan LCS, yang tidak dikehendaki China, menjadi faktor krusial bagi timbulnya ketegangan di LCS (Beech, nytimes.com., 21 April 2020). Menariknya, kehadiran kapal perang AS tersebut terjadi berulang kali meski mendapatkan penentangan dari China. Di bulan November 2019, misalnya, dua kapal perang AS, USS Wayne E. Meyer dan USS Gabrielle, dalam rangka mempromosikan kebebasan navigasi, melakukan pelayaran di wilayah LCS.



Gambar 1: Peta Sengketa Teritorial di Laut China Selatan

Sumber: UNCLOS and CIA

Juru bicara Armada ke-7 Angkatan Laut AS, Komandan Rean Mommsen, menyebutkan bahwa pengerahan kapal-kapal AS itu juga dilakukan untuk menentang klaim China atas Kepulauan Paracel yang berada di wilayah LCS (cnnindonesia.com., 22 November 2019). Langkah AS tersebut mendapat penentangan keras dari China, dan sebagai akibatnya, ketegangan di kawasan LCS pun tidak terhindarkan, karena kapal-kapal perang mereka saling berhadapan.

Di tahun 2020, sebagaimana telah dikemukakan di atas, ketegangan yang terjadi di LCS, seperti yang terjadi pada bulan April dan awal Mei 2020, juga disebabkan oleh adanya respons keras China terhadap kehadiran kapal perang AS di LCS, baik itu dalam kerangka latihan bersama maupun kebebasan bernavigasi, terlebih jika kehadiran armada AS itu ditujukan untuk

menentang penguasaan China atas wilayah LCS. Di sisi lain, kapal perang AS bekepentingan melakukan pelayaran di perairan LCS, salah satu jalur pelayaran strategisnya di kawasan Asia-Pasifik, dan jika diperlukan, juga untuk menunjukkan kekuatan terhadap kapal perang China yang mengintimidasi mitra AS di kawasan itu (navytimes.com., 8 Mei 2020).

Penjelasan singkat di atas, secara tidak langsung, mengungkap adanya persetujuan antara AS dan China untuk menanamkan dan memperkuat pengaruh kekuasaan mereka di kawasan Asia-Pasifik, di mana perairan LCS, sebagai salah satu jalur pelayaran strategis di kawasan ini, dan juga dunia, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan harus diamankan oleh keduanya. Ini artinya, ketegangan yang kerap terjadi di LCS tidak dapat dipisahkan dari adanya persetujuan antara

AS dan China, terutama untuk memperkuat pengaruh kekuasaan (*power*) mereka di kawasan Asia Pasifik.

ASEAN Harus Lebih Tegas

Ketegangan yang kerap terjadi di LCS tidak boleh dibiarkan begitu saja oleh ASEAN, yang sebagian anggotanya bersengketa dengan China di LCS. Manuver kapal perang AS di LCS, yang memicu ketegangan dengan China, tidak boleh dilihat oleh ASEAN sebagai persoalan bilateral AS-China. ASEAN harus melihatnya dalam konteks keamanan yang lebih luas, mengingat ketegangan tersebut berpotensi menimbulkan konflik dan pada akhirnya mengancam stabilitas kawasan.

Upaya ASEAN membangun stabilitas kawasan, khususnya di LCS memang telah diupayakan melalui jalur diplomasi dengan pihak China, yaitu melalui pembentukan *Code of Conduc* (CoC). CoC ini sengaja dibentuk untuk mengatur tata perilaku negara-negara yang berada di sekitar LCS. Pada bulan Juli 2019, ASEAN dan China telah menyepakati kerangka awal CoC, setelah dibahas hampir dua dekade lamanya. Kini, ASEAN dan China tengah melanjutkan perundingan guna menyusun substansi teknis CoC, yang ditargetkan selesai pada 2021, sebelum secara final disepakati dan diimplementasikan.

Waktu perundingan yang lama dalam menyusun CoC, menunjukkan betapa tidak mudah membuat aturan tata perilaku yang bisa disepakati bersama di

LCS. Jika memerhatikan langkah-langkah asertif China di LCS, antara lain membangun pulau buatan sebagai pangkalan militer, dan kerap mengusir kapal-kapal negara pengklaim lainnya yang memasuki LCS, dapat dipastikan bahwa ketidakmudahan dalam menyusun CoC itu lebih disebabkan oleh sikap China yang tidak mau diatur dan diikat dalam urusan LCS. China tampaknya khawatir, aturan dalam CoC akan membatasi pergerakannya di LCS yang diklaim hampir seluruhnya menjadi miliknya.

Dalam situasi seperti itu, tidak ada pilihan lain bagi ASEAN untuk mengambil sikap yang lebih tegas dalam perundingan dan penyusunan CoC dengan China, meskipun hal itu tidak mudah. Namun demikian, dalam kerangka menindaklanjuti pilar Komunitas Politik-Keamanan ASEAN Tahun 2015, utamanya dalam mewujudkan perdamaian di kawasan Asia Tenggara, yang juga berdekatan dengan LCS, ASEAN harus tampil lebih tegas dalam menghadapi China soal LCS, termasuk dalam penyusunan CoC. ASEAN harus memastikan bahwa CoC yang akan diimplementasikan dapat mencegah terjadinya ketegangan, tidak hanya antara China dan para pihak yang bersengketa di LCS, tetapi juga secara lebih luas kepada para pihak yang berkepentingan di LCS, termasuk AS. AS, sebagai salah satu mitra strategis ASEAN, harus menghormati CoC yang diprakarsai oleh ASEAN dan China.

Sementara itu, ASEAN juga harus menekankan pentingnya pendekatan multilateralisme dalam penyelesaian konflik di kawasan ini, agar tidak terjadi dominasi kekuasaan satu negara terhadap negara lain. Dalam kasus LCS, upaya penyelesaian sengketa hendaknya menghormati hukum internasional, terutama Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau UNCLOS 1982. AIPA, sebagai organisasi antar-parlemen negara-negara ASEAN, sudah tentu harus mendukung sikap ASEAN dalam mencari solusi damai atas sengketa teritorial di LCS.

Penutup

Ketegangan di LCS sudah seharusnya tidak terus terjadi jika para pihak yang bersengketa dan juga yang berkepentingan di LCS memiliki kesepahaman bersama tentang pentingnya menjaga stabilitas di kawasan ini. Hal tersebut tampaknya tidak mudah diwujudkan, dikarenakan China dan AS, sebagai dua negara besar yang berkepentingan dengan LCS, kerap berseteru di kawasan ini. Pada saat yang bersamaan, China, yang bersengketa teritorial dengan sejumlah negara ASEAN, masih terus melakukan langkah-langkah sepihak untuk menguasai LCS. Situasi demikian perlu direspons ASEAN melalui tindakan yang lebih tegas dalam menyusun CoC dengan China terkait LCS, dan juga dengan terus mempromosikan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional, khususnya UNCLOS 1982, dalam mencari solusi damai atas sengketa teritorial yang terjadi di LCS. Sedangkan semua pintu

penyelesaian bilateral tidak perlu dibuka lagi, demi memberi kesempatan bagi CoC dan solusi multilateralisme dapat bekerja dengan baik.

Referensi

- “Abaikan Hukum, China Beri Nama 80 Pulau dan Fitur Geografis di Laut China Selatan”, *kompas.com.*, 21 April 2020, <https://www.kompas.com/2020/04/21/>, diakses 11 Mei 2020.
- Beech, Hannah. “U.S. Warships Enter Disputed Waters of South China Sea as Tensions with China Escalate”, *nytimes.com.*, 21 April 2020, <https://www.nytimes.com/2020/04/21/>, diakses 12 Mei 2020.
- “China: Klaim Vietnam di Laut China Selatan Ilegal”, *republika.co.id.*, 21 April 2020, <https://republika.co.id/berita/>, diakses 11 Mei 2020.
- “Indonesia Calls for Parties to Exercise Self-restraint in South China Sea Amid Pandemic”, *thejakartapost.com.*, 7 Mei, <https://www.thejakartapost.com/news/2020/05/07/>, diakses 11 Mei 2020.
- “Kapal Perang AS Berlayar di Laut China Selatan, China Marah”, *cnnindonesia.com.*, 22 November 2019, <https://www.cnnindonesia.com/20191122/>, diakses 12 Mei 2020.
- “Ketegangan Laut China Selatan, AS dan Australia Kirim Kapal Perang Lakukan Latihan Bersama”, *pikiranrakyat.com.*, 23 April 2020, <https://www.pikiran-rakyat.com/>, diakses 11 Mei 2020.

"Kode Perilaku ASEAN-China di Laut China Selatan Ditarget Rampung 2021", *sindonews.com.*, 11 Desember 2018, <https://international.sindonews.com/>, diakses 13 Mei 2020.

"Laut China Selatan Bergolak Saat Pandemi", *Kompas*, 17 Mei 2020, hal. 3.

"Navy Ships Head into South China Sea to Counter Beijing Bullying," *navytimes.com.*, 8 Mei 2020 <https://www.navytimes.com/2020/05/08/>, diakses 12 Mei 2020.



Simela Victor Muhamad
simela.muhamad@dpr.go.id

Drs. Simela Victor Muhamad, M.Si. adalah Peneliti Ahli Utama Bidang Isu-isu Politik Strategis, Masalah Internasional dan Domestik pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian (Puslit BKD) DPR RI. Aktif sebagai peneliti pada Puslit BKD DPR RI, yang bertugas memberikan dukungan substansi terkait isu-isu hubungan internasional kepada Anggota DPR RI. Beberapa Karya tulis ilmiah yang pernah diterbitkan antara lain "Kepentingan Maritim China dan Kawasan Respons Indonesia." (bagian dari buku *Agenda Poros Maritim*, Penerbit Azza Grafika, 2015); "Kejahatan Transnasional Penyelundupan Narkoba ke Indonesia: Masalah dan Upaya Penanganannya" (bagian dari buku *Aktor Non-Negara: Kajian Implikasi Kejahatan Transnasional di Asia Tenggara*, Penerbit Yayasan Obor, Indonesia, 2017); "Isu Keamanan Semenanjung Korea dan Upaya Damai Parlemen." (artikel di *Jurnal Politica* Vol 7 No. 1, Mei 2016) dan "Peran Asian Parliamentary Assembly dalam Mendukung Solusi Damai Palestina-Israel" (artikel di *Jurnal Politica*, Vol. 8 No. 1, Mei 2017).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.